



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURFITRI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 722738

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 962.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 144.100.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 84.700.000
6. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 79.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.500.000

1. MOTOR, HONDA GL200 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.800.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.262.936
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.089.462.936
III. HUTANG	Rp.	800.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	289.462.936

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.